

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan nilai yang melekat diberbagai sendi kehidupan merupakan suatu keharusan sejarah dalam perkembangan peradaban. Perubahan ini harus ditempatkan sebagai proses pembangunan dengan memperhitungkan dan melakukan antisipasi gerak laju pembangunan sesuai kebutuhan bangsa. Proses demikian dimaksudkan agar pembangunan berubah secara evolusioner yang terkendali. Wardiman Djojonegoro (1996) menegaskan sejumlah persyaratan untuk mewujudkan perubahan yang dikehendaki antara lain: (1) adanya keterbukaan masyarakat untuk menghadapi perubahan dilandasi dengan sikap selektif, (2) adanya rasionalitas dan objektivitas dilandasi dengan sikap disiplin, (3) meningkatkan daya pikir masyarakat yang sehat dilandasi dengan pemberdayaan pendidikan profesional.

Dari sejumlah persyaratan di atas, tidak berlebihan bila kita menggaris bawahi "pendidikan profesional" merupakan syarat paling mutlak dalam mewujudkan perubahan evolusioner dan terkendali. Melalui pendidikan akan mampu dikembangkan sikap rasionalitas dan objektivitas serta sikap selektif dan merupakan wahana untuk mewujudkan keterbukaan yang sehat. Pendidikan harus dijadikan wahana strategis mewujudkan Sumber Daya Manusia unggul dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dilaksanakan melalui pendidikan sekolah dan luar sekolah.

Dipandang dari sudut visi, pendidikan merupakan upaya pewarisan nilai-nilai yang dianut dalam komunitas, setidaknya oleh generasi terdahulu untuk diwariskan dan dikembangkan kepada para penerusnya. Nilai-nilai kehidupan yang dijadikan norma masyarakat merupakan proses pengumpulan dan penyaringan berbagai muatan kultural telah dipahami dan dilaksanakan serta dihayati untuk mencermati kehidupan. Nilai-nilai yang diwariskan melalui pendidikan menunjukkan tingkat kemajuan budaya yang telah dicapai. Secara operasional, proses pendidikan tersebut bersumber dari hasil olah budaya dan teknologi secara langsung maupun tidak langsung telah turut mempengaruhi pola kehidupan manusia.

Tatkala pendidikan dijadikan wahana strategis dalam mewariskan nilai-nilai budaya dan teknologi kepada generasi ini, ada tendensi agamis yang memiliki muatan khusus dimana pendidikan harus ditempatkan sebagai tolok ukur menentukan tingkat derajat manusia dengan apa yang menjadi tanggung jawab. Dalam surat Al An'aam 165, Allah Swt berfirman:

“Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai pengelola di bumi serta Dia pula yang meninggikan derajat kamu sehingga melebihi dari sebahagian lainnya agar Ia menguji kamu dengan apa yang diberikan kepada kamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat memberikan hukuman dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (RHA. Soenarjo, Cs, 1989)

Jelas bahwa melalui pendidikan derajat, manusia akan menjadi tinggi. Dari ketinggian derajat ini mereka dikategorikan seorang pengelola. Ketika diberikan prediket pengelola yang dibekali derajat tinggi melalui pendidikan, Allah-pun memberikan berbagai ujian agar mereka menyadari posisinya. Tidak berlebihan

bila orang-orang yang memiliki pendidikan dengan bekal kemampuan profesional mempunyai peluang besar dalam merenggut keberhasilan ujian dari tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka atas seluruh rangkaian pekerjaan dalam kehidupan.

Diakui dalam kehidupan ini, tugas dan kewajiban manusia sangat variatif dan setiap bidang pekerjaan yang dilakoni pada dasarnya merupakan ujian pertanggungjawaban di kemudian hari, termasuk tugas-tugas kemanusiaan seperti mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Pemerintah menyikapi positif "*statement*" ini dengan mencoba memberikan solusi sejak puluhan tahun silam. Akan tetapi solusi kemanusiaan ini dirasakan belum tuntas karena diketahui bahwa salah satu sumber penyebabnya adalah komitmen sepihak dari kalangan pemerintahan. Pekerjaan berat yang belum tuntas tersebut adalah **Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun** sebuah kebijakan yang mencoba memadukan prinsip tertentu berorientasi kepada *equity*, *equality*, dan *quality* sejak dicanangkan bulan Mei 1984.

Sebenarnya dari kronologis konsep Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun mengandung suatu perubahan pada tataran konseptual yang dimulai dengan menempatkan SLTP ke dalam lingkup pendidikan dasar. Pada tahap awal, Program Wajib Belajar akan diaplikasikan, ternyata tidak serta merta langsung dilaksanakan mengingat masih banyak di antara anak usia Sekolah Dasar yang belum menerima pelayanan pendidikan di sekolah. Kondisi ini diketahui dari pendidikan yang dilaksanakan di daerah-daerah terpencil, sulit,

tertinggal atau bahkan anak-anak yang dikategorikan “gelandangan”. Pemerintah-pun mulai mendirikan sekolah-sekolah. Secara kuantitas, ternyata Sekolah Dasar berada dalam hitungan terbesar dari lembaga pendidikan lainnya. Konsekwensi pendirian Sekolah Dasar yang dikenal dengan sebutan “SD INPRES” tentunya harus menyediakan infrastruktur yang memadai. Masalah yang membentang sampai saat ini adalah kekurangan guru.

Dengan tidak menjebakkan diri dalam kajian kekurangan guru, ternyata Sekolah Dasar yang dibangun sampai ke seluruh pelosok tanah air belum menjawab kebutuhan Wajib Belajar, dan permasalahan yang menyelimutinya tetap saja mencuat kepermukaan. Indikasi yang dapat diketengahkan masih banyak anak usia sekolah yang belum bersekolah, apakah mereka tidak mau bersekolah? ataukah ada larangan tertentu dari pihak orang tua? apakah sekolah yang dibangun selama ini belum menampung semua anak usia sekolah untuk belajar di sana? atau ada penyebab lain seperti sistem persekolahan yang merugikan mereka sebagai konsekwensi kebijakan sepihak dari pemerintah serta nilai guna pendidikan yang belum dirasakan dalam menjawab tuntutan kehidupan setempat. Persoalan-persoalan ini sengaja dikemukakan guna menelusuri akar permasalahan di sekitar Wajib Belajar. Apatah lagi pelaksanaan Program Wajib Belajar saat ini sudah diarahkan untuk menuntaskan anak 13-15 Th. agar melanjutkan studi ke SLTP. Bagaimana perkembangan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun pada Tingkat SLTP Kota Bandung sebagai kasus akan dipaparkan seperti pada halaman berikut.

B. Spektrum Pendidikan SLTP Kota Bandung

Paparan bagian ini berkaitan dengan kondisi Kota Bandung dalam hal-hal sebagai berikut: (1) sekilas geografi, demografi dan ekonomi, (2) SLTP secara kuantitatif dan kualitatif, (3) angka Partisipasi SLTP, serta (4) angka melanjutkan studi dari SD/MI sebagai perbandingan anak usia sekolah yang bersekolah.

1. Geografi, Demografi dan Ekonomi Kota Bandung

Bandung merupakan kota terbesar di Propinsi Jawa Barat yang sekaligus dijadikan Ibu Kota Propinsi. Memiliki nilai strategis sebagai kota politik yang dikenal sebagai penyelenggara Konperensi Asia Afrika yang sukses. Juga memiliki nilai edukatif seperti adanya sejumlah Perguruan Tinggi ternama, di mana para Tokoh Pendiri Republik ini memperoleh pendidikan. Kemudian dikenal sebagai Kota Pariwisata yang ditandai sejumlah bangunan kuno peninggalan sejarah dan tidak kalah penting lainnya justru panorama yang indah disertai iklim dingin, di sana ada sejumlah museum, taman-taman, dan tempat pemandian.

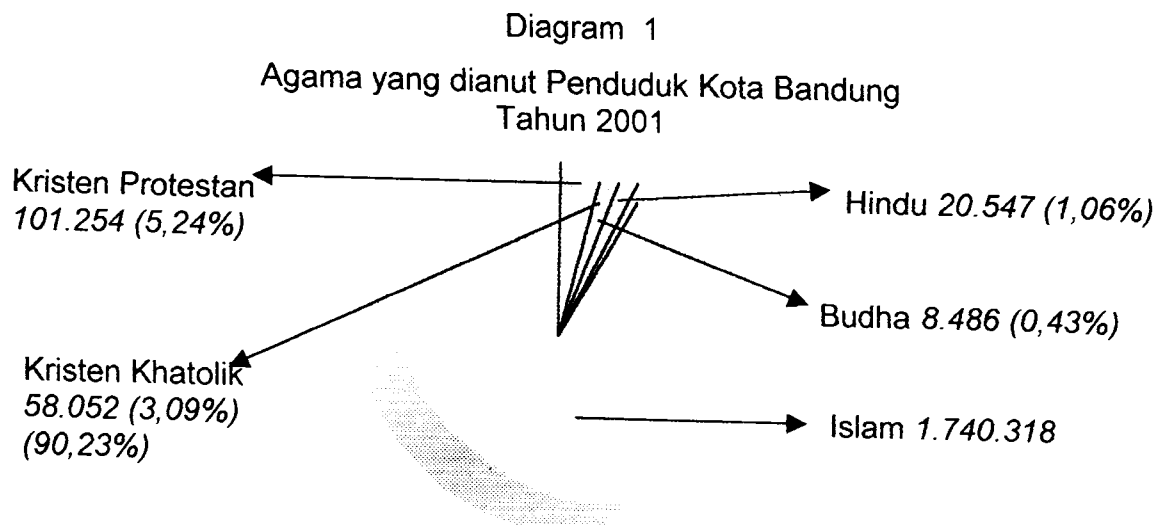
Secara geografis Kota Bandung justru dikelilingi oleh Kabupaten Bandung yang membentang di sebelah utara berbatas dengan Lembang Kabupaten Bandung, sebelah timur dengan Kabupaten Bandung, sebelah selatan dengan Kabupaten Bandung dan sebelah barat berbatas dengan Kotif Cimahi Kabupaten Bandung. Secara administratif pemerintahan terdiri atas 26 kecamatan dan 139 kelurahan dengan luas wilayah seluruhnya 166,62 Km². 3 (tiga) kelurahan atau 2,15% masih dikategorikan desa tertinggal. Pada tahun 1999/2000 masih memperoleh dana IDT sebesar Rp. 720.000.000,00.

Dilihat dari iklim, Kota Bandung memiliki iklim kemarau dan musim penghujan. Menurut kebiasaan musim hujan diperkirakan pada bulan Nopember sampai dengan April dengan suhu rata-rata 231,2 mm, curah hujan tertinggi dan terendah masing-masing 258,4 mm serta 52,8 mm. Sedangkan rata-rata suhu terendah masing-masing 18 derajat Celcius dan tertinggi 25 derajat Celcius. Musim kemarau terjadi pada bulan September sampai Pebruari.

Potensi geografi yang menguntungkan lainnya adalah kekayaan alam yang dimiliki, baik kekayaan yang sudah dimanfaatkan maupun belum terolah. Di samping panorama yang indah juga sangat subur ditanami berbagai sayuran, seperti terlihat di bagian utara dan selatan kota. Akan tetapi peluang pertanian kian hari semakin sempit segabai dampak pemukiman penduduk yang amat padat serta urbanisasi yang dirasakan sebagai masalah serius. Potensi geografi seperti inipun membuka peluang strategis pada sektor industri yang harus dimanfaatkan dalam menyukseskan Program Wajib Belajar.

Sementara itu, ditinjau dari demografi Kota Bandung memiliki penduduk sebanyak 1.928.656 orang. Diantara jumlah tersebut terdapat 239.834 orang berada dalam kategori usia 7-12 tahun. Sedangkan 113.755 orang lainnya berusia 13-15 tahun, dan 162.003 orang berusia 16-18 tahun. Berdasarkan Data Depdiknas Kota Bandung (2000) diketahui perkembangan penduduk setiap tahun berkisar 3,2% dengan angka kelahiran sebesar 0,45%. Angka kematian sebesar 0,29%. Angka migrasi keluar sebesar 0,02%, dan angka urbanisasi sebanyak 2,25%. Menurut data terakhir, Kota Bandung dengan kepadatan penduduk rata-

rata adalah 11,575 orang/Km dengan Kecamatan Babakan Ciparay sebagai Kecamatan terpadat (29.329 orang/Km) dan Kecamatan Bandung Wetan sebagai Kecamatan yang memiliki penduduk paling jarang (9.025 orang/Km). Ditinjau dari agama dan mata pencaharian penduduk dapat dilihat diagram berikut.



Tabel 1
Mata Pencaharian Penduduk Kota Bandung
Tahun 2001

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH
1	Jasa Kemasyarakatan (Unggulan)	1.360.969 Orang
2	Bidang Perdagangan (Unggulan)	181.155 Orang
3	Industri Pengolahan	160.281 Orang
4	Jasa Angkutan	32.801 Orang
5	Sektor Keuangan	15.282 Orang
6	Listrik, Gas dan Air Minum	7.827 Orang
7	Tani, Buruh dan Perikanan	6.336 Orang
8.	Pertambangan dan Galian lainnya	3.727 Orang

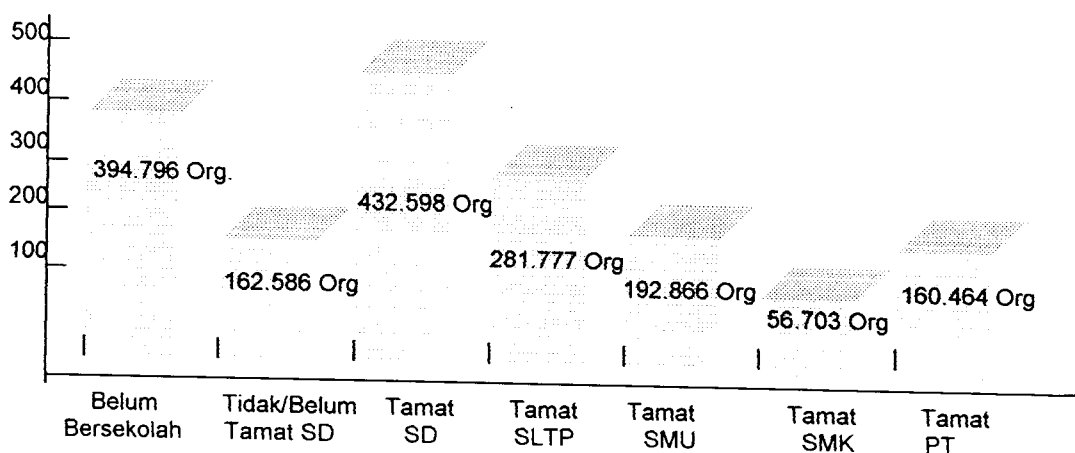
Sumber : Kantor Depdiknas Kota Bandung
Tahun 2001.



Selanjutnya, dilihat dari jumlah angkatan kerja sebanyak 705.337 orang dan saat ini Kota Bandung memiliki PAD sebesar Rp. 118.997.921.000,00. Penerimaan dari PBB saja sebesar Rp. 16.536.759.325 atau pendapatan perkapita sebesar Rp. 1.378.060.277. Rata-rata pendapatan sebesar Rp. 3.424.480,00, sedangkan UMR sebesar Rp. 172.500,00.

Bila diperhatikan tingkat pendidikan penduduk, ternyata cukup beragam seperti dituangkan dalam diagram berikut.

Diagram 2
Tingkat Pendidikan Penduduk Kota Bandung
Tahun 2001



Sumber : Kantor Depdiknas Kota Bandung
Tahun 2001.

2. SLTP Secara Kuantitatif dan Kualitatif

Pada saat ini jumlah SLTP dan sederajat yang berada di Kota Bandung sebanyak 257 lembaga yang terdiri dari 219 SLTP dan 38 MTs. Sedangkan data gedung, ruang belajar, fasilitas, guru dan murid dapat diuraikan berikut.

Kondisi gedung yang tidak semuanya baik dan memerlukan perbaikan ringan sampai perbaikan sedang, ternyata memiliki daya tampung memadai dengan kapasitas ruang kelas sebanyak 2.103 ruang, terdiri dari 1.914 ruang (91,01%) di SLTP dan 189 ruang (8,98%) di MTs. Sedangkan jumlah rombongan belajar atau kelas yang digunakan dalam proses belajar mengajar sebanyak 2.575 kelas, terdiri dari 2.388 kelas (92,73%) di SLTP dan 187 kelas (7,26%) berada di MTs. Menurut perbandingan kelas dan ruang kelas tersebut menunjukkan adanya shift yang cukup, yaitu rasio kelas / RK pada SLTP 1,25 dan MTs 0,98 atau pada SLTP+MTs 1,22. Shift SLTP menunjukkan penggunaan secara ganda baik pada pagi maupun sore. Ini berarti SLTP masih terdapat kekurangan jumlah ruang kelas, namun sebaliknya shift di MTs memperlihatkan jumlah kelas yang cukup memadai. Sebanyak 1.771 ruang kelas SLTP dikategorikan baik, 83 ruang rusak ringan dan 60 rusak berat. Kondisi ruang kelas MTs, justru terdapat 167 ruang masih baik, 14 ruang rusak ringan, serta 8 ruang rusak berat. Artinya ada 1.938 ruang kelas dalam kondisi baik dan 97 ruang rusak ringan serta 68 ruang rusak berat.

Demikian juga guru yang difungsikan untuk mengajar di sana berjumlah 6.979 orang terdiri atas 6.268 guru mengajar di SLTP (89,81%), dan 711 guru berada sebagai tenaga pengajar MTs atau sebesar 10,19%. Diantara mereka terdapat kategori guru tidak berbakat disebabkan loyalitas, dedikasi yang sangat rendah diketahui dari perilaku sebagai guru atau tingkat disiplin yang membutuhkan perhatian pihak berkepentingan. Berdasarkan indikasi ini, data



kantor setempat memberikan penilaian atas 1.213 guru SLTP dikategorikan tidak layak mengajar dan 107 guru MTs juga demikian. Artinya guru yang dinilai layak mengajar masih besar yakni sebanyak 5.659 guru dari 6.979 guru SLTP dan MTs Kota Bandung.

Dari aspek lain diketahui bahwa fasilitas penunjang pengajaran cukup memadai pada sekolah-sekolah tertentu, terutama sekolah-sekolah “unggul” yang menjadi rebutan masyarakat sebagai konsekwensi pembinaan kualitas yang telah diakui. Kondisi bermula dari kemampuan pimpinan setempat memberdayakan masyarakat yang dilengkapi fasilitas pemerintah. Akan tetapi sekolah-sekolah tertentu masih membutuhkan bantuan berbagai pihak, di samping fasilitas seperti perlengkapan kelas yang masih minim juga ketersediaan buku pelajaran dan alat pelajaran lainnya yang sangat prihatin, terutama SLTP ataupun MTs swasta yang mengakibatkan kurang diminati masyarakat. Secara kuantitas, laboratorium yang dimiliki SLTP sebanyak 177 unit dan MTs sebanyak 10 unit. Perpustakaan SLTP sebanyak 161 unit dan MTs sejumlah 5 unit. Lapangan olahraga SLTP sebanyak 219 tempat dan MTs sebanyak 38 lokasi. Fasilitas penunjang UKS sebanyak 93 terdapat di SLTP, dan sejumlah 6 fasilitas terdapat di MTs. Dari data yang ditampilkan tersebut diketahui bahwa secara umum frekwensi pemberdayaan fasilitas sangat tinggi.

Ditinjau dari kualitas pendidikan SLTP secara umum masih terlihat angka putus sekolah dan tidak lulus. Pada tahun 2000/2001 saja terdapat 0,39% siswa mengulang dan 0,36% siswa putus sekolah justru terjadi pada SLTP, sementara

di MTs, Fenomena tersebut tidak ditemukan. Artinya MTs menamatkan seluruh siswa kelas III pada tahun pelajaran 2000/2001. Data terakhir Depdiknas Kota Bandung menggambarkan kualitas SLTP menunjukkan variasi tertentu seperti dalam tabel berikut.

Tabel 2
Mutu SLTP dan MTs Kota Bandung
Tahun 2000/2002

NO	KOMPONEN	SLTP	MTs	TOTAL
1	Rata-rata NEM Siswa Baru Tk. I	31,35	31,25	31,30
2	Rata-rata NEM Lulusan	35,97	30,92	33,45
3	Angka Mengulang Kelas	400	0	400
4	Angka Putus Sekolah	369	0	369
5	Angka Lulusan	35.429	1.828	37.257
6	Guru Layak Mengajar	3.500	486	3.986
7	Aktivitas Guru dalam MGMP	aktif	aktif	aktif
8	Pemanfaatan Fasilitas	baik	baik	baik
9	Partisipasi Orang Tua	Cukup	Cukup	Cukup
10	Biaya Satuan (Rp/Bln)	31.746	22.646	31.208

Sumber : *Depdiknas Kota Bandung
Tahun 2001*

Secara faktual keberadaan siswa usia 13-15 Tahun pada SLTP Kota Bandung cukup besar. Tahun pelajaran 2000/2001 diketahui sebanyak 108.110 orang, dan bila dirinci akan terbaca bahwa: (1) 101.716 siswa SLTP, dan (2) 6.394 siswa MTs. Dicermati secara seksama antara jumlah penduduk Kota Bandung yang berusia 13-15 Tahun sebanyak 113.775 orang dan anak yang bersekolah sebanyak 108.110 orang berarti terdapat 5.645 anak usia sekolah yang tidak bersekolah atau diprediksi tidak melanjutkan studi ke jenjang pendidikan SLTP. Melihat fenomena ini, fokus perhatian kita pasti akan tertuju

pada Program Wajib Belajar yang ditawarkan sebagai obat ampuh mengatasi kebodohan tersebut masih perlu dipertanyakan, mengapa angka tersebut masih besar dan mengapa anak-anak bisa demikian?

3. Angka Partisipasi SLTP

Kesempatan terdahulu sudah disinggung-singgung tentang mutu pendidikan di SLTP dan MTs, pada bagian ini kembali mempersoalkan bahwa salah satu tolok ukur kebermutuan SLTP tersebut justru diketahui dari "Angka partisipasi baik kasar maupun murni yang selalu dikenal APK dan APM". Kota Bandung salah satu barometer keberhasilan pendidikan di Propinsi Jawa Barat, pada tahun 1999/2000 saja terlihat Angka Partisipasi Kasar (APK) sangat tinggi, yakni sebesar 95,04%. Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) sebesar 69,47%. Yang cukup mengembirakan justru pencapaian prosentase tersebut didukung oleh peranan sekolah swasta sekitar 51,00%.

Data yang diungkapkan dari Departemen Pendidikan Nasional Kota Bandung, sekarang dilebur dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota menjadi Dinas Pendidikan Kota tersebut memberikan isyarat bahwa kendatipun prosentase APK dan APM cukup mengembirakan, mengingat persoalan ini tergolong kepada masalah sosial mau tidak mau perubahan bisa terjadi, bisa menjadi naik atau sebaliknya tahun yang akan justru menjadi turun. Di sini dibutuhkan manajemen pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi pendidikan di bergai lapisan masyarakat. Suatu harapan tentunya bahwa ke depan diperlukan genjotan APM secara maksimal.

4. Angka Melanjutkan Studi dari SD-MI

Di atas telah diungkapkan terjadinya peningkatan kualitas pendidikan SLTP yang ditandai dengan Rata-rata NEM siswa baru sebesar 31,35 dan Rata-rata NEM Lulusan sebesar 35,97. Diakui banyak faktor yang menentukannya, termasuk peranan guru, fasilitas belajar serta peran orang tua dan sebagainya. Persoalan sekarang justru idealnya bahwa keberhasilan peningkatan kualitas NEM ini diikuti oleh peningkatan jumlah melanjutkan ke SLTA.

Mengingat Program Wajib Belajar baru pada tahapan Pendidikan Dasar, maka protret yang diutamakan untuk diungkapkan selanjutnya adalah Angka Melanjutkan Studi dari SD-MI ke SLTP sebagai titik berangkat melihat permasalahan Wajar Tingkat SLTP. Jumlah lulusan SD-MI Kota Bandung pada tahun yang sama sejumlah 34.529 murid, terdiri dari 33.957 murid Sekolah Dasar dan 572 murid Madrasah Ibtidaiyah. Idealnya semua lulusan harus melanjutkan ke SLTP dan Madrasah Tsanawiyah yang beralokasi di Kota Bandung. Kendatipun sebagian kecil tidak memilih Kota Bandung sebagai studi lanjutan ini dengan alasan tertentu, namun Pemerintah melalui Dinas Pendidikan sudah mengatisipasi kemungkinan bertambah sebagai konsekwensi sekolah-sekolah di Ibu Kota Propinsi menjadi primadona.

Data Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kota Bandung (2001) menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan dan kelebihan dari jumlah lulusan di Kota Bandung dengan 37.353 murid baru yang menempati SLTP dan MTs, masing-masing 34.879 murid dan 2.474 murid. Kemudian angka melanjutkan

studi dari SD-Mi ke SLTP dan MTs terlihat sebanyak 108.018 murid. Di sini dapat diketahui bahwa yang tidak melanjutkan studi atau studi di luar Kota Bandung sebanyak 92 orang.

Sementara itu, angka melanjutkan studi dari SLTP/MTs ke SMU/ sederajat sebanyak 109.400 murid. Jika diamati dengan teliti terlihat bahwa angka lulusan SLTP/MTs pada tahun yang sama sejumlah 37.257 siswa dan siswa baru kelas I SMU/Sederajat sebanyak 40.760 siswa. Di sini juga terlihat kenaikan yang cukup berarti dalam angka melanjutkan studi dihitung pada tahun tersebut di kelas I sebagai siswa baru.

Ketika terjadi peningkatan angka melanjutkan studi baik dari SD/MI ke SLTP/MTs, maupun dari SLTP/MTs ke SMU/sederajat, pada sisi lain ada permasalahan serius yang membutuhkan jawaban dan tindakan secara simultan, terutama sejumlah 5.645 anak usia sekolah yang tidak bersekolah/ melanjutkan studi serta masih ditemukan 92 siswa yang tidak diketahui perihal kelanjutan studinya. Sedangkan semua lembaga pendidikan telah diberdayakan secara baik, termasuk memaksimalkan peran guru, Kepala Sekolah serta partisipasi masyarakat baik dalam bentuk BP3 maupun masyarakat petani, perusahaan industri dan sebagainya.

Demikian banyak lembaga yang berperan dalam menuntaskan Program Wajib Belajar, pada sudut lain justru terlihat pandangan pemerintah yang cenderung memaksimalkan peran satuan pendidikan berstatus negeri. Suatu indikasi yang tidak dapat dipungkiri bahwa ternyata satuan pendidikan swasta

berperan banyak dalam menuntaskan masalah wajib belajar pendidikan dasar di tanah air, termasuk SLTP Swasta Kota Bandung

C. Fokus Permasalahan

Seperti disinggung-singgung sebelumnya bahwa saat ini masalah yang menyelimuti pelaksanaan program wajib belajar tetap saja “mengapung” di atas permukaan dan ternyata belum tuntas diatasi dengan baik. Dari fenomena di atas, digambarkan bahwa kondisi pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun masih membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak, bila masa depan bangsa ini tidak mengulangi “nasib buruk” yang pernah dialami sebagai konsekuensi kebodohan bangsa. Yang amat dirasakan belum tuntas tersebut justeru bagi anak usia belajar 13-15 tahun. Benarkah demikian? Yang jelas perhatian kali ini difokuskan untuk melihat pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun tingkat SLTP, khususnya SLTP Swasta.

Mengingat masalah wajib belajar memiliki ruang lingkup yang amat kompleks dan di dalamnya menyentuh berbagai kepentingan serta tanggung jawab dari berbagai pihak, maka melalui studi ini difokuskan untuk mengkaji tentang “Partisipasi Penyelenggara Sistem Pendidikan (Masyarakat) dan Pengelola Satuan Pendidikan SLTP Swasta Kota Bandung dalam melaksanakan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun”.

Sebenarnya dari fokus masalah ini, dapat diketahui partisipasi tersebut berkaitan erat dengan upaya meningkatkan APK, APM dan NEM, dengan mengatasi masalah “*mengulang kelas dan putus sekolah*”. Oleh karena itu,

rincian substansial aspek partisipasi dilihat dari tugas pelaksanaan dan tanggung jawab sebagai bentuk partisipasi manajemen. Bila dikonotasikan dalam pernyataan kuantifikasi dirumuskan sebagai berikut:

1. X_1 = Partisipasi Penyelenggara Sistem Pendidikan (Pihak Yayasan SLTP Swasta Kota Bandung);
2. X_2 = Partisipasi Tenaga Pengelola Satuan Pendidikan (Kepala Sekolah) SLTP Swasta Kota Bandung, dan
3. Y = Hasil Wajib Belajar Sembilan Tahun yang dilaksanakan di SLTP Swasta Kota Bandung.

Oleh karena penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, maka berikut ini dirumuskan pertanyaan dengan rincian meliputi:

1. Bagaimana partisipasi Penyelenggara Sistem Pendidikan (Pihak Yayasan) dalam melaksanakan program wajar dikdas sembilan tahun (X_1)?
 - (1) Apakah mereka memahami makna wajib belajar?
 - (2) Bagaimana sikap kepeduliannya?
 - (3) Bagaimana bentuk keterlibatan mencegah terjadinya masalah mengulang kelas dan putus sekolah?
 - (4) Keunggulan apa saja yang dicapai selama ini?
 - (5) Kendala apa saja yang dihadapi dalam partisipasi operasional?
 - (6) Bagaimana pendekatan yang diterapkannya
2. Bagaimana partisipasi Pengelola Satuan Pendidikan (Kepala Sekolah) melaksanakan program wajar dikdas sembilan tahun di tingkat SLTP (X_2)?
 - (1) Bagaimana pemahaman tentang wajar dikdas sembilan tahun?
 - (2) Bagaimana sikap kepedulian mereka?
 - (3) Bagaimana bentuk keterlibatan mencegah masalah yang terjadi?

- (4) Keunggulan apa saja yang dicapai partisipasi selama ini?
 - (5) Kendala apa saja yang dihadapi dalam partisipasi mereka?
 - (6) Bagaimana Pendekatan dalam mengatasi masalah wajar tersebut?
3. Bagaimana perbandingan pelaksanaan program wajar dikdas sembilan tahun dengan SLTP Negeri (X3)?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian adalah melihat potret partisipasi Pihak Yayasan dan Kepala SLTP Swasta Kota Bandung dalam melaksanakan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun tingkat SLTP dengan permasalahan yang dialami selama ini seperti mengulang kelas dan putus sekolah. Kemudian melihat substansi pelaksanaan program wajib belajar dalam pendekatan SWOT yang digunakan untuk memberikan dan menetapkan alternatif pemecahan masalah wajib belajar di sekolah setempat.

Tujuan khusus penelitian ini yakni mendeskripsikan dan mengevaluasi partisipasi Pihak Yayasan dan Kepala SLTP Swasta Kota Bandung dalam melaksanakan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun tingkat SLTP dengan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Partisipasi Penyelenggara Sistem Pendidikan (Pihak Yayasan SLTP Swasta) dalam melaksanakan program wajar dikdas sembilan tahun.
 - (1) Pemahaman tentang makna wajar dikdas sembilan tahun;
 - (2) Sikap kepeduliannya;

- (3) Bentuk keterlibatan dalam mencegah tinggal kelas dan putus sekolah;
 - (4) Keunggulan yang dicapai selama ini dalam implementasi program wajar dikdas sembilan tahun di lembaga tersebut;
 - (5) Kendala yang dihadapi dalam partisipasi operasional;
 - (6) Pendekatan yang diterapkannya.
2. Partisipasi Pengelola Satuan Pendidikan (Kepala SLTP Swasta) dalam melaksanakan program wajar dikdas sembilan tahun.
- (1) Pemahaman tentang wajar dikdas sembilan tahun;
 - (2) Sikap kepedulian terhadap implementasi wajar dikdas;
 - (3) Bentuk keterlibatan dalam mencegah masalah wajar dikdas;
 - (4) Keunggulan yang dicapai partisipasi selama ini;
 - (5) Kendala yang dihadapi dalam partisipasi;
 - (6) Pendekatan dalam mengatasi masalah wajar dikdas.
3. Perbandingan kualitas pelaksanaan program wajar dikdas sembilan tahun antara SLTP Swasta dan SLTP Negeri Kota Bandung.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini bukan saja untuk peneliti sendiri melainkan untuk bahan informasi mengambil keputusan bagi pejabat berwenang di Kota Bandung dan lain sebagainya. Selanjutnya juga memperkaya hasana keilmuan, terutama dalam mewujudkan pemberdayaan pihak Yayasan dan pihak Kepala Sekolah dalam mengatasi masalah wajib belajar, sekitar masalah pelayanan pendidikan, mengulang kelas dan putus sekolah.

E. Paradigma Penelitian

Ketika pendidikan dijadikan wahana untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, pemerintah terus menggulirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi jauh ke depan dalam rangka mewujudkan kualitas dengan indikasi kualitas hasil (manusia unggul) maupun kualitas proses (pelayanan profesional). Kebijakan tersebut sulit untuk diwujudkan manakala Pelaksanaan Program Wajib Belajar belum tuntas pada sisi lain masih dihadapkan kepada masalah komitmen Pengelola dan Penyelenggara Institusi pendidikan masih bervariasi.

Betapa penting peran satuan pendidikan, termasuk SLTP Swasta dalam mewujudkan kebijakan tersebut, ternyata Pihak Pengelola dan Penyelenggara sekolah memegang andil cukup besar. Akan tetapi ada kecenderungan pola manajemen yang diterapkan selama ini hanya sebatas rutinitas dan belum menyentuh aras peningkatan partisipasi yang diharapkan. Partisipasi manajemen sekolah seyogyanya mengutamakan pendekatan SWOT untuk memecahkan masalah Program Wajib Belajar yang berkaitan dengan peningkatan daya tampung, pelayanan pengajaran yang efektif serta meningkatkan kesadaran orang tua agar anak-anak tetap bersekolah. Bentuk partisipasi tersebut meliputi sumbangan moril, materil dan tenaga dari Pihak Pengelola dan Penyelenggara yang diwujudkan dalam implementasi program.

Sehubungan dengan pernyataan tersebut, disusun paradigma penelitian seperti dilukiskan dalam gambar 1 yang justru dijadikan panduan untuk melihat partisipasi Pengelola dan Penyelenggara secara komprehensif.

Gambar 1
Paradigma Penelitian

